



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN IV 2024



BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL





RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja penggerak pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Biro Perencanaan memiliki 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024. Pengertian Indikator Kinerja yaitu ukuran keberhasilan capaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun anggaran, Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja untuk tahun berjalan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir, Biro Perencanaan berkewajiban untuk melaporkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan.

Dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Hasil perbandingan antara target dengan realisasi pada 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan 14 (empat belas) Indikator Kinerja diperoleh persentase hasil capaian kinerja Biro Perencanaan pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **106,60%**.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-022.01.1.466301/2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp. 27.383.678.000,-** namun terdapat **blokir anggaran** atau dana yang tidak dapat dicairkan yaitu sebesar **Rp. 1.685.839.000,-** sehingga total anggaran Biro Perencanaan tahun 2024 menjadi **Rp. 25.697.839.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 25.694.566.001,-**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Biro Perencanaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **99,99%**.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wata'ala, sehingga penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan apa yang diamanahkan dan yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Biro Perencanaan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban dan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian sasaran dan kegiatan yang dilakukan selama periode Triwulanan (3 bulan) terhadap target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Perencanaan dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana dan program serta penetapan kebijakan pentarifan sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal, efektif dan efisien.

Sangat disadari bahwa Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Biro Perencanaan ini belum secara sempurna menyajikan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna perbaikan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Biro Perencanaan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Januari 2025

KEPALA BIRO PERENCANAAN

SIGIT WIDODO



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan.....	1
1.3 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro dan Struktur Organisasi Biro Perencanaan.....	2
1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Perencanaan.....	4
1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	5
1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	5
1.7 Sistematika Laporan.....	9
2 CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN	10
2.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan	10
2.1.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.....	10
2.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel.....	11
2.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	17
2.1.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	18
2.1.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	25
2.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	28
2.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	29
2.1.8 Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	31



2.1.9 Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan.....	38
2.2 Realisasi Anggaran.....	40
3 PENUTUP.....	45
3.1 Kesimpulan	45
3.2 Saran	45
LAMPIRAN	46
Lampiran I : Capaian TW IV Tahun 2024.....	46
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	47
Lampiran III : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	50
Lampiran IV : Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024	51
Lampiran V : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024	6
Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Biro Perencanaan.....	8
Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	10
Tabel 2. 3 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel.....	11
Tabel 2. 4 Capaian Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023	12
Tabel 2. 5 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024.....	14
Tabel 2. 6 Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	17
Tabel 2. 7 Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	18
Tabel 2. 8 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan.....	18
Tabel 2. 9 Kegiatan Jasa Transportasi Bagian Pentarifan dan Pelaporan dan Bagian Rencana	19
Tabel 2. 10 Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	25
Tabel 2. 11 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	26
Tabel 2. 12 Rekapitulasi Catatan Hal IVa Tahun 2024.....	27
Tabel 2. 13 Capaian Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal.....	28
Tabel 2. 14 Komponen Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023	29
Tabel 2. 15 Capaian Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	29
Tabel 2. 5 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024.....	30
Tabel 2. 17 Capaian Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal.....	31
Tabel 2. 18 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.....	31
Tabel 2. 19 Tabel Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi dengan Kondisi Lapangan	34
Tabel 2. 20 Hasil Perhitungan Kepuasan Layanan Kantor di Biro Perencanaan.....	36
Tabel 2. 21 Capaian Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan.....	38
Tabel 2. 22 Capaian Triwulan IV Tahun 2024 Biro Perencanaan	39
Tabel 2. 23 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komposisi SDM Biro Perencanaan Berdasarkan Jabatan dan Jenjang Pendidikan.....	2
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	3
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan.....	3
Gambar 1. 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Biro Perencanaan	5
Gambar 1. 5 Peta Strategis Biro Perencanaan	7
Gambar 2. 1 Kegiatan terkait SAKIP Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024.....	13
Gambar 2. 3 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Variabel.....	35
Gambar 2. 4 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Indikator	36



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan **good governance** yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Biro Perencanaan. Laporan Kinerja Biro Perencanaan digunakan sebagai salah satu alat pemacu peningkatan dan perbaikan kinerja unit eselon kerja di lingkungan internal maupun di lingkungan Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.2 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Biro Perencanaan adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan yang keberadaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang memiliki tugas berupa:

"Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan."

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan mempunyai fungsi :

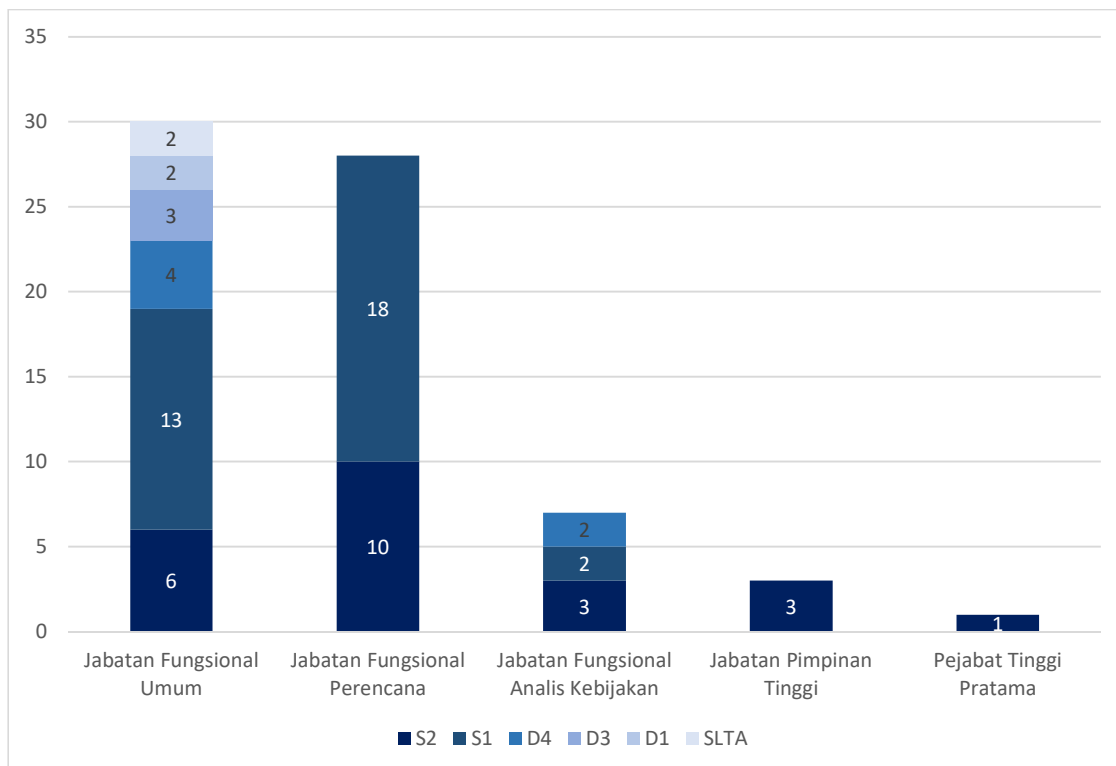
1. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang, dan rencana bergulir (*rolling plan*), koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi unit Sekretariat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), program dan



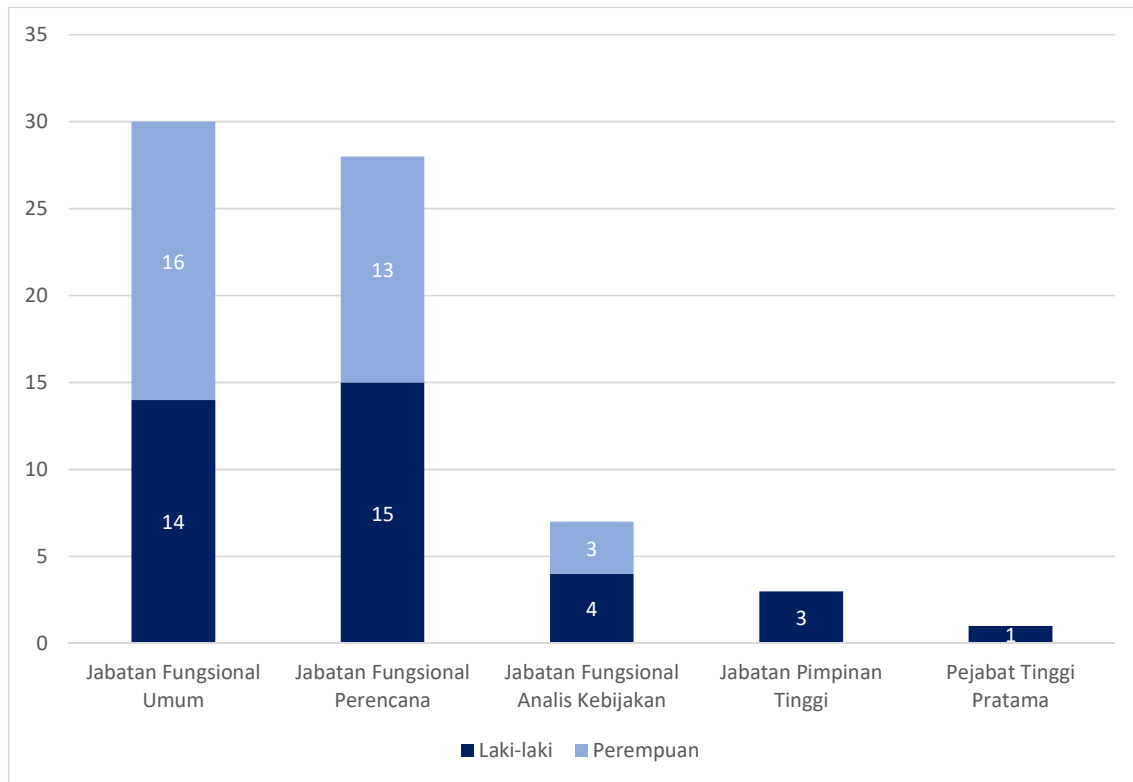
- anggaran serta penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
3. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan penyusunan rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk lembaga negara dan pemerintah;
 4. Penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro dan Struktur Organisasi Biro Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan diperkuat oleh 69 personil, antara lain didukung oleh 28 orang Pejabat Fungsional Perencana, 7 orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan, 30 orang Pejabat Fungsional Umum, 3 orang Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1 orang Pejabat Tinggi Pratama. Adapun persentase tertinggi jenjang pendidikan terakhir SDM Biro Perencanaan, didominasi lulusan S1 sebanyak 33 orang atau 47,83% dari jumlah total personil.



Gambar 1. 1 Komposisi SDM Biro Perencanaan Berdasarkan Jabatan dan Jenjang Pendidikan



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:

1. Bagian Rencana;
2. Bagian Program;
3. Bagian Pentarifan dan Pelaporan;
4. Bagian Analisa dan Evaluasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan



1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, mengingat Kepala Biro Perencanaan selaku **Chief of Planning Officer** dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Kementerian Perhubungan.

Keberhasilan Biro Perencanaan sebagai organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dalam melakukan mitigasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal yang cepat dan sulit diprediksi. Biro Perencanaan perlu melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dapat mempengaruhi proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Masih diperlukan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif;
2. Masih diperlukan peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan perhubungan;
3. Masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM melalui **Capacity Building**;
4. Masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kinerja perencanaan perhubungan.

Salah satu permasalahan yang cukup mendasar saat ini adalah belum ada indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain sinkronisasi antara perencanaan dan program kegiatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, lemahnya koordinasi antara unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga kendala dan permasalahan yang ditemukan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Perhubungan. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen / unit kerja lingkup Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, masih diperlukan upaya-upaya yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan efisiensi perencanaan anggaran lingkup Kementerian Perhubungan.



1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dalam rangka penyelenggaraan Perencanaan Kinerja, Biro Perencanaan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan dan berisi informasi mengenai target kinerja. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2024 Unit Kerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	79
		Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
2	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Perhubungan yang Berbasis Akuntabel	Indeks Maturitas SPHP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	75
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	1
4	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Bidang Perencanaan	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Nilai	73
5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		Tingkat keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Nilai	80
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indeks Maturitas SPHP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95
9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90

Jakarta, Desember 2023

Kepala Biro Perencanaan


SIGIT WIDODO

Gambar 1. 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Biro Perencanaan

1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Selain Rencana Kinerja Tahunan, pada awal tahun 2024, Biro Perencanaan juga telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang termuat dalam suatu kesepakatan perjanjian kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jumlah Pagu Alokasi Anggaran Biro Perencanaan pada Tahun 2024 berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-022.01.1.466301/ 2024 tanggal 08 Juli adalah sebesar **Rp. 27.383.678.000,-** namun terdapat **blokir anggaran** atau dana yang tidak dapat dicairkan yaitu sebesar **Rp. 1.685.839.000,-** sehingga total anggaran Biro Perencanaan tahun 2024 menjadi **Rp. 25.697.839.000,-**. Dengan demikian, isi dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dapat diketahui sebagai berikut:



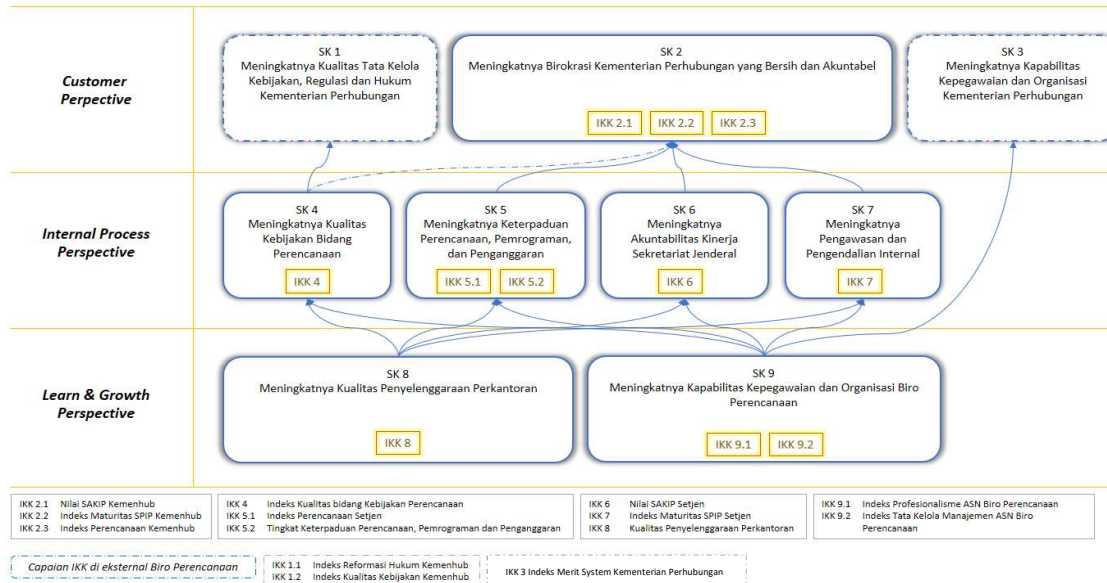
Tabel 1. 1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73
5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95
9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 tentang penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Biro Perencanaan yang mendorong Biro Perencanaan melaksanakan Rencana Strategisnya berdasarkan Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama di Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan yang telah berorientasi pada hasil (*outcome*). Dengan adanya Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat penyesuaian terhadap target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. Pertama yaitu pada IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan



Kementerian Perhubungan yang semula 78 menjadi 60. Kedua yaitu pada Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan yang semula memiliki 2 (dua) IKK pada Triwulan IV 2023 setelah dilakukan reviu menjadi 1 (satu) IKK yaitu Indeks *Merit System* Kementerian Perhubungan dengan target sebesar 0,75. Dengan adanya penyesuaian tersebut sehingga akan dapat mempengaruhi jumlah IKK Biro Perencanaan yang semula berjumlah 15 (lima belas) IKK menjadi 14 (empat belas) IKK. Peta Strategis Biro Perencanaan, Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel, sebagai berikut :



Gambar 1. 5 Peta Strategis Biro Perencanaan

1. Customer Perspective

Terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan yang dua di antaranya merupakan sasaran penunjang, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) : Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Kementerian Perhubungan.

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) : Meningkatnya birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel.

Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) : Meningkatnya kapabilitas kepegawaian dan organisasi Kementerian Perhubungan.

2. Internal Process Perspective

Merupakan proses yang harus dilakukan untuk mencapai *output* atau *outcome* yang diharapkan. Terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan, yaitu :

- Sasaran Kegiatan 4 :** Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perencanaan. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4) :** Indeks kualitas bidang kebijakan perencanaan.



- b. **Sasaran Kegiatan 5** : Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :
 - **Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 (IKK 5.1)** : Indeks perencanaan Setjen;
 - **Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 (IKK 5.2)** : Tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c. **Sasaran Kegiatan 6 (SK 6)** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK 6)** : Nilai SAKIP Setjen.
- d. **Sasaran Kegiatan 7 (SK 7)** : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK 7)** : Indeks maturitas SPIP Setjen.

3. Learn and Growth Perspective

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, diperlukan input yang dapat mendukung terlaksananya proses yang menghasilkan *output* atau *outcome* Biro Perencanaan. Terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

- a. **Sasaran Kegiatan 8 (SK 8)** : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perkantoran. Memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 8 (IKK 8)** : Kualitas penyelenggaraan perkantoran.
- b. **Sasaran Kegiatan 9 (SK 9)** : Meningkatnya kapabilitas kepegawaian dan organisasi Biro Perencanaan. Memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : Tingkat Kenyamanan Kerja Biro Perencanaan yang Nyaman dan Kondusif.

Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Biro Perencanaan

Sasaran		Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan
SS1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai
SS2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai
SS3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK3.1	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai
SS4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	IKK4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai
SS5		IKK5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai



Sasaran		Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan
	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	IKK5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai
SS6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	IKK6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai
SS7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	IKK7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai
SS8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai
SS9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	IKK9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai
		IKK9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai

1.7 Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Perencanaan dalam masa periode Triwulan IV tahun 2024. Capaian kinerja (***performance result***) 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (PK) 2024 atau sering disebut dengan ***performance agreement*** sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Biro Perencanaan tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, struktur organisasi serta penjelasan singkat mengenai perjanjian kinerja organisasi.

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pada BAB ini disajikan capaian kinerja organisasi pada periode Triwulan IV untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB III PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja;
- Lain-lain yang dianggap perlu.



2 CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pencapaian sasaran strategis kegiatan Biro Perencanaan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan yang telah ditetapkan. Pengukuran indikator tersebut dilakukan secara periodik menggunakan **tools e-performance** yang berbasis web.

2.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan

2.1.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan yang baik merupakan implementasi penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab. Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan tersebut, dituangkan dalam 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97,76	118,63
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					139,84%

IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-OT.03.03-73 tanggal 11 November hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, diketahui bahwa nilai Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah **97,76** dengan kategori **AA (istimewa)** atau persentase capaian sebesar **118,63%**. Angka realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan 4 variabel Indeks Reformasi Hukum, yaitu:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%), dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).



IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan

Pada Triwulan IV tahun 2024 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan memperoleh nilai **90,63** dimana hasil tersebut menggunakan metode perhitungan gabungan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Perencanaan kebijakan terdiri dari:

- Agenda setting dengan pertanyaan kunci: identifikasi masalah dan konsultasi public yang dilakukan;
- Formulasi kebijakan dengan pertanyaan kunci : *Forward looking, Outward Looking, Learns Lesson, dan Compliance.*

Pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

- Implementasi kebijakan dengan pertanyaan kunci: dimensi perencanaan, dimensi kelembagaan dan dimensi komunikasi kebijakan;
- Evaluasi kebijakan dengan pertanyaan kunci : pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak dan *sustainability*).

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada saat ini masih menggunakan hasil penilaian nasional Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh LAN dimana dapat **berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan.**

2.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan *good governance*, yang mana pemerintah melalui setiap K/L diminta untuk memberikan laporan dari program yang telah dilaksanakan untuk dapat menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dalam penilaian meningkatnya birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78,85	98,56
IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6	3,382	93,94
IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96,20	113,18
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					101,89%



IKK 2.1 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 telah diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor: B/59/AA.05/2023 pada tanggal 27 November 2023 dengan hasil evaluasi penilaian sebesar **78,85** dengan **kategori BB**. Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Capaian Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Realisasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,93
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,92
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,02
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,98
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Berdasarkan nilai tersebut dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada saat menyusun pohon kinerja agar mengidentifikasi keterkaitan kinerja dengan unit kerja/sektor/instansi pemerintah lain;
2. Agar memastikan tidak terdapat sasaran kinerja yang bersifat teknis masuk ke dalam dokumen perencanaan unit kerna dukungan/non teknis;
3. Agar memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound serta Cukup) dalam mengukur keberhasilan sasaran kinerja;
4. Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja kementerian maupun unit kerja guna memastikan bahwa target kinerja memenuhi prinsip logis, dapat dicapai, menantang, serta selaras dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKP);
5. Memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana aksi unit kerja telah dilengkapi dengan output kegiatan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-performance sebagai sarana monitoring evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil monev kinerja untuk peningkatan capaian target kinerja;
7. Memastikan dokumen SAKIP tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui lama ESR;



8. Memastikan Instansi pemerintah dan seluruh unit kerja menyajikan analisis efisiensi, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja renstra, serta analisis ketidaktercapaian target kinerja sebagai bahan evaluasi dalam mencapai target selanjutnya;
9. Agar Inspektorat sebagai evaluator internal terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP internal unit kerja;
10. Agar Inspektorat melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil evaluasi serta unit kerja lebih terdorong dalam meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja.

Selain itu sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait SAKIP Kementerian Perhubungan, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- Pengisian capaian kinerja periode Triwulan IV pada bulan Oktober s.d. Desember 2024 pada aplikasi **e-Performance**;
- Dialog Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan III Tahun 2024 kepada Unit Eselon I Kementerian Perhubungan tanggal 10 Oktober 2024 di D'Anaya Hotel Bogor;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 tanggal 5 Desember 2024 di Hotel D'Anaya Bogor;
- Rapat Persiapan Reviu Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Perhubungan tanggal 6 Desember 2024 di RR I Biro Perencanaan;
- Rapat Pembahasan Persiapan Revisi PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP tanggal 10 Desember 2024 di Bigland Sentul, Bogor.



Gambar 2. 1 Kegiatan terkait SAKIP Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024



IKK 2.2 Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024 terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		1,800
2.	Struktur dan Proses		0,712
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0,870
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,382
	-MRI	3	3,034
	-IEPK	2	2,000

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan;
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional;
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.



Meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

IKK 2.3 Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2024 bagi seluruh K/L/D dimana menjadi salah satu komponen penilaian RB General sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional K/L/D (Pemerintah Provinsi), penilaian IPPL K/L dilakukan untuk menilai kualitas Perencanaan dalam hal Integrasi, Sinkronisasi dan Keterhubungan antar dokumen Perencanaan. Penilaian IPPN dapat menemukan ketidakselarasan antar dokumen yang secara menyeluruh akan menunjukkan predikat kualitas perencanaan yang ada.

Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN K/L tersebut, yang meliputi aspek Integrasi, Sinkronisasi dan aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS pada ketiga aspek tersebut, Kementerian Perhubungan mendapat total nilai **96,20** dengan predikat **"Sangat Baik"**.

Berdasarkan hasil penilaian IPPN K/L, beberapa poin rekomendasi secara umum yang dapat menjadi pedoman terkait tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh suatu K/L untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya, antara lain meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran pada Renstra (rencana 5 tahunan) yang disusun oleh K/L wajib mengacu dan sama/sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMN agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai;
2. Perencanaan pada Renja K/L (rencana 1 tahunan) yang disusun oleh K/L harus:
 - a. Mengacu dan sama/sesuai dengan perencanaan dalam Renstra K/L yang mencakup Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan untuk tahun tersebut,
 - b. Mengacu dan sama/sesuai dengan tahapan target kinerja tahunan pada Renstra yang harus dicapai dan termuat sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Nomenklatur, Satuan dan Target) K/L tahun tersebut,



- c. Memastikan adanya alokasi anggaran pada RKA yang sama nilainya untuk setiap Nomenklatur rencana pada Renja K/L tahun tersebut.
3. Untuk K/L pengampu dan leading sector Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional harus:
 - a. Menjadikan seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Prioritas Nasional yang ditetapkan pada RPJMN sebagai IKU atau Target dan Sasaran Kinerja K/L pada Renstra dan Renja K/L terkait sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya,
 - b. Memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut,
 - c. Mengalokasikan anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang akan ditetapkan dalam RKP menjadi alokasi Anggaran Output Prioritas dalam RKA sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya.
4. Untuk K/L pengampu Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP harus memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Output Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut;
5. Secara umum, memahami dan melaksanakan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan cermat serta memahami tata cara penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlaku;
6. Mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal Sistem Perencanaan Nasional, Sistem Penganggaran Pembangunan, dan Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Penganggaran;
7. Memanfaatkan forum Mitra K/L untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dan berkelanjutan termasuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang ada;
8. Memanfaatkan forum Bilateral Meeting untuk penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dengan mempersiapkan sebelumnya data, informasi, dan konsep awal Renja K/L serta dukungan SDM yang berkompeten untuk memastikan terwujudnya kesesuaian antara Renja K/L, Renstra K/L, dan RKP;
9. Memanfaatkan forum Trilateral Meeting, Rakorbangpus dan Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dengan RKP serta merencanakan penganggaran untuk RKA K/L yang selaras dengan RKP.



2.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pegawai memberikan dukungan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan hasil penajaman pada *Road Map* RB ke-4 terdapat penyesuaian 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN menjadi 1 (satu) IKK yaitu Indeks *Merit System* Kementerian Perhubungan. Penyesuaian ini dikarenakan dalam aspek penilaian *Merit System* untuk ruang lingkup penilaian sudah meliputi kegiatan Profesionalisme ASN dan Tata Kelola Manajemen ASN seperti Perencanaan kebutuhan ASN dan pengembangan karir ASN, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK3	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75	0,74	98,67
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan					98,67%

IKK 3 Indeks Merit System Kementerian Perhubungan

Hasil capaian Indeks Merit Sistem pada tahun 2024 yaitu Kementerian Perhubungan memperoleh penghargaan pada **kategori III (Baik)** dengan nilai 296 dan indeks **0,74**, dengan beberapa catatan perbaikan dari BKN pada 6 (enam) Aspek, yaitu:

1. Aspek Perencanaan kebutuhan berupa penetapan peta jabatan dan rencana kebutuhan 5 tahun yang telah disesuaikan dengan SOTK Terbaru setelah proses penyetaraan jabatan, Anjab, ABK serta rencana strategis instansi;
2. Aspek Pengadaan berupa mengintegrasikan program pelatihan dasar CPNS dengan program pengembangan kompetensi teknis bidang tugas lainnya;
3. Aspek Pengembangan Karir berupa melengkapi penyusunan talent pool dan rencana suksesi jabatan lainnya, memperdalam analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja setiap pegawai yang diperbaharui secara berkala, menyusun dan melaksanakan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai;
4. Aspek Promosi dan Mutasi berupa menyusun kebijakan internal tentang pola karir, pengisian jabatan dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi, dokumen penilaian uji kompetensi terkait proses dan pertimbangan atas hasil mutasi/promosi, melaksanakan pengisian JPT secara terbuka, kompetitif dan berkoordinasi dengan BKN;



5. Aspek Manajemen Kinerja berupa menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai dan strategi / program untuk mengatasi permasalahan/kinerja tersebut serta dilakukan monitoring dan evaluasi atas strategi yang telah dilakukan;
6. Aspek Sistem Informasi berupa mengintegrasikan sistem kepegawaian internal dengan SIASN, mengintegrasikan e-kinerja dengan data Dokumen Manajemen Sistem (DMS) untuk mengelola hasil penilaian kinerja, mengembangkan e-office dan mengintegrasikan dalam dashboard pimpinan, meningkatkan penggunaan metode assessment center untuk penilaian kompetensi bagi seluruh pegawai.

2.1.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Sasaran strategis meningkatnya kualitas kebijakan bidang perencanaan dalam pengukurannya diukur melalui penilaian indeks kualitas bidang kebijakan perencanaan. Adapun rincian Indikator Kinerja kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73	48,07	65,85
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					65,85%

IKK 4 Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur capaian rancangan dokumen kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang pentarifan. Adapun indikator atau kriteria yang digunakan dalam pengukuran dirinci sebagai berikut:

1. *Agenda setting* atau usulan dengan bobot sebesar 24;
2. Formulasi kebijakan atau telaah dokumen dengan bobot sebesar 36;
3. Implementasi Kebijakan dengan bobot sebesar 24;
4. Evaluasi Kebijakan dengan bobot sebesar 16.

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan perhitungan terhadap kebijakan di bidang perencanaan. Adapun rincian terkait perhitungan kriteria dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Indikator	Bobot	Kebijakan Bag Rencana	Kebijakan Bag Tarif	Realisasi
<i>Agenda Setting</i>	24	1	56	24
Formulasi Kebijakan	36	1	22	14,53
Implementasi Kebijakan	24	0	22	9,26
Evaluasi Kebijakan	16	0	1	0,28
Total Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan				48,07



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV - Biro Perencanaan Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas kebijakan bidang perencanaan sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2024 diperoleh sebesar **48,07**. Adapun rincian kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Kegiatan Jasa Transportasi Bagian Pentarifan dan Pelaporan dan Bagian Rencana

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
1	Agenda Setting	a. Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor; b. Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian; c. Usulan Tarif Kolektif Matra Darat di Lingkup Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan; d. Usulan Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni; e. Usulan Perubahan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik; f. Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan dan Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga di Lingkungan Pelabuhan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Reguler Merak dan Bakauheni); g. Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pelabuhan pada Layanan Eksekutif Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni; h. Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara; i. Usulan Penggunaan Prasarana KA dan Faktor Prioritas; j. Usulan Besaran Tarif LRT Jabodetabek; k. Usulan Penetapan Tarif BLU Poltekpel Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan; l. Usulan Penyesuaian Tarif Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta; m. Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Kelas I tanjung Priok; n. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Region I Terminal Petikemas Belawan Fase II; o. Usulan Tarif Tarif Jasa Pelayanan Pemanduan dan Peundaan Kapal untuk PT Sarana Lintas Bahari di Paiton – Probolinggo; p. Usulan Tarif Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Kalianget dan Ende-Ippi; q. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Dermaga Emas Nusantara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan Perairan Tersus PLTU I Rembang; r. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri di Perairan Banten; s. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Krakatau Bandar Samudera di Perairan Banten; t. Usulan Tarif Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak di Perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya Provinsi Jawa Timur;	57



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV - Biro Perencanaan Tahun 2024

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		u. Usulan Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayanan Barat Surabaya; v. Usulan Tarif Jasa Petikemas PT Pelindo Region III Cabang Pelabuhan Banjarmasin; w. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur; x. Usulan Tarif Kepelabuhanan (Hi-Co Scan) PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok; y. Usulan Tarif Jasa Petikemas Ocean Going PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Tanjung Perak; z. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal BUP PT Jasa Armada Indonesia Tbk Pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang di Bayah Provinsi Banten; - aa. Usulan Tarif Jasa Petikemas PT Pelindo Region IV Cabang Pelabuhan Sorong; - bb. Usulan Tarif Jasa Petikemas di PT Pelindo Region IV Terminal Petikemas Kariangau Balikpapan; - cc. Usulan Tarif Jasa Barang PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Pulang Pisau; - dd. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 1 Pelabuhan Lhokseumawe; - ee. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 4 Pelabuhan Garongkong; - ff. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Barang PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Banjarmasin; - gg. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Deltha Artha Bahari Nusantara Pelabuhan Probolinggo; - hh. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Terminal; ii. PT Indonesia Multi Purpose Terminal; - jj. Usulan Tarif Kepelabuhanan (Hi-Co Scan) PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Belawan; - kk. Usulan Tarif Jasa Kapal dan Barang pada PT Pelindo Region I Pelabuhan Teluk Nibung Cabang Tanjung Balai Asahan; - ll. Usulan Tarif Jasa Barang pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Tanjung Intan; - mm. Usulan Tarif Jasa Barang pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Celukan Bawang; - nn. Usulan Tarif Jasa Petikemas Domestik pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Kupang; - oo. Usulan Tarif Jasa Petikemas Domestik pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Tanjung Perak; - pp. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Domine Eduard Osok Sorong; - qq. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda; - rr. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Sultan Babullah Ternate;	



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		ss. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika; tt. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Rendani Manokwari; uu. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Halu Oleo Kendari; vv. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan; ww. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Djalaludin Gorontalo; xx. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Kalimantan Berau; yy. Usulan Penyesuaian Tarif PJP2U Di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II; zz. Usulan tarif penumpang angkutan udara perintis Tahun 2024; aaa. Usulan Tarif Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan; bbb. Usulan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), tarif Garbarata dan tarif Check-in Counter pada 8 (delapan) Bandar Udara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura II; ccc. Usulan penetapan tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) di Bandar Udara Sentani Jayapura; ddd. Usulan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan; eee. Usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan Bandar Udara Kualanamu yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura Aviasi; fff. Pedoman perencanaan terintegrasi revisi PM 112 tahun 2017; saat ini telah menyelesaikan kajian RIA (Regulatory Impact Assessment).	
2	Formulasi Kebijakan	a. Pembahasan Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor; b. Pembahasan Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian; c. Pembahasan Usulan Tarif Kolektif Matra Darat di Lingkup Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan, uji petik dan verifikasi lapangan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang; d. Pembahasan Usulan Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni; e. Pembahasan Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan dan Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga di Lingkungan Pelabuhan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero); f. Pembahasan Perubahan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan	23



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		Kewajiban Pelayanan Publik dan Telah mendapat rekomendasi Kemenkomarves Rekomendasi Usulan Besaran Tarif LRT Jabodetabek; g. Pembahasan Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pelabuhan pada Layanan Eksekutif Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni; h. Pembahasan Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara; i. Pembahasan Usulan Penggunaan Prasarana KA dan Faktor Prioritas; j. Pembahasan Usulan Besaran Tarif LRT Jabodetabek; k. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/3/8 PHB 2023 tanggal 5 April 2023 hal usulan penetapan Tarif Layanan BLU Poltekpel Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan; l. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/6/3 PHB 2023 tanggal 22 September 2023 hal Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran m. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/8/10 PHB 2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok; n. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/1/3/MHB 2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Laut di Lingkungan Kementerian Perhubungan; o. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Menteri Keuangan tentang usulan tarif kolektif pada 10 (sepuluh) Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di lingkup Kementerian Perhubungan; p. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Menteri Keuangan tentang Usulan Tarif Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan; q. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II tentang Tanggapan Penyesuaian Tarif PJP2U di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II; r. Pembahasan tarif penumpang angkutan udara perintis Tahun 2024; s. Proses penyusunan dokumen telaahan usulan penyesuaian tarif pada 8 (delapan) Bandar Udara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura II; t. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I tentang Tanggapan Usulan penetapan tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) di Bandar Udara Sentani Jayapura;	



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV - Biro Perencanaan Tahun 2024

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		u. Penyusunan dokumen usulan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan; v. Proses penilaian tingkat pelayanan (Level of Service) Bandar Udara Kualanamu; w. Pembahasan Kajian RIA (Regulatory Impact Assessment) Pedoman perencanaan terintegrasi revisi PM 112 tahun 2017, diperkirakan akhir tahun 2022 dapat di implementasikan.	
3	Implementasi Kebijakan	a. Surat Menteri Perhubungan nomor KU.103/6/13 PHB 2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.205/1/3/STJ/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian Transfromasi Badan Layanan Umum Balai Pengujian Perkeretaapian (BPKA) Kementerian Perhubungan (Proses Review dan Telaah Kementerian Keuangan); b. Surat Menteri Perhubungan nomor KU.103/5/24 PHB 2023 tanggal 24 September 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.202/1/2/STJ/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian Transformasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perhubungan (proses review dan telaah Kementerian Keuangan); c. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan Nomor KU.103/1/3 MHB 2024 tanggal 7 Maret 2024 Hal Usulan Jenis dan Tarif Layanan Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Darat di Lingkup Kementerian Perhubungan (Telah dilaksanakan uji publik usulan penyesuaian tarif BLU BPSDM Kemenhub di Hotel Luminor tanggal 27 September 2024 dan selanjutnya menunggu Harmonisasi PMK dengan Kemenkumham); d. Surat Kepala Biro Perencanaan kepada Sesditjen Perhubungan Darat nomor PR.302/1/17 STJ 2024 tanggal 2 April 2024 hal Tindak Lanjut Usulan Permohonan Arahan dan Pertimbangan Atas Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni; e. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan kepada Kepala Biro Hukum nomor 309/3/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Revisi Keputusan Menteri KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik; f. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 479/BI/3/IX/2024 tanggal 18 September 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Usulan Penetapan Keputusan Menteri Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara;	22



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		g. Surat Menteri Perhubungan nomor PR.005/1/212/MHB 2024 tanggal 26 Juli 2024 hal Permohonan Persetujuan Nilai Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) KA dan Faktor Prioritas (FP) untuk Perhitungan PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ Track Access Charge (TAC) (Sedang dilakukan kajian oleh DJKA terkait nilai SBPP dan FP untuk perhitungan tarif PNBP TAC serta pengaturan tarif sampai dengan Rp.0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)) h. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor UM.006/4/15/STJ/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal usulan Besaran Tarif LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) dan Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor B-2030/MENKO/IT.03.00/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Rekomendasi Usulan Besaran Tarif LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi; i. Surat Menteri Perhubungan kepada Direktur Utama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) nomor PR.302/2/19/MHB/2024 tanggal 18 Oktober 2024 hal Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Layanan Eksekutif di Pelabuhan Merak dan Bakauheni; j. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyeragaman Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Petikemas Belawan Fase II Nomor PR.302/1/1 MHB 2024 tanggal 8 Januari 2024; k. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Awal Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Kelas III di Perairan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan Perairan Tersus PLTU I Rembang Nomor PR.302/1/11 MHB 2024 tanggal 2 April 2024; l. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Banten BUP PT Krakatau Bandar Samudera Nomor PR.302/1/15 MHB 2024 tanggal 30 April 2024; m. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Banten BUP PT Pelabuhan Cilegon Mandiri Nomor PR.302/1/16 MHB 2024 tanggal 30 April 2024; n. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Paket Kegiatan Pelayanan Tambahan di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok Nomor PR.302/1/21/MHB 2024 tanggal 29 Mei 2024; o. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya Nomor PR.302/2/1/MHB 2024 tanggal 8 Juli 2024; p. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Petikemas Banjarmasin dan Pelabuhan Teluk Bayur Nomor PR.302/2/3/MHB 2024 tanggal 7 Agustus 2024;	



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		q. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Awal Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang, Bayah-Provinsi Banten Nomor PR.302/2/4/MHB 2024 tanggal 7 Agustus 2024; r. KM 158 Tahun 2023 Tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2024; s. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor PR.303/1/2 MHB 2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan; t. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/1/2 MHB 2024 tanggal 24 Juni 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif BLU Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan; u. Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II nomor PR.303/1/16/MHB 2024 tanggal 11 September 2024 hal Tanggapan Usulan Penyesuaian Tarif PJP2U Internasional Pada Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru; v. Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I nomor PR.303/1/14/MHB 2024 tanggal 27 Agustus 2024 hal Tanggapan Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) pada Bandar Udara Sentani Jayapura.	
4	Evaluasi Kebijakan	a. Keputusan Menteri nomor KM 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 67 Tahun 2023 Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	1

2.1.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran

Sasaran strategis meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengukurannya dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun rincian Indikator Kinerja kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85	100	117,65
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80	97,07	121,34
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					119,49%



IKK 5.1 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal

Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan pada unit kerja Sekretariat Jenderal. Cara perhitungan untuk Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal

No	Aspek	Bobot	Realisasi
A	Integrasi Perencanaan		
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Setjen dengan sasaran RPJMN *)	20%	100
2	Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN	20%	100
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	30%	100
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L ***)	30%	100
Total Integrasi Perencanaan		100%	100

Dengan catatan untuk *) diukur 1 kali dalam 5 Tahun, sedangkan untuk ***) untuk mengukur Indeks Perencanaan K/L

Dalam perhitungan sesuai dengan kriteria, sampai dengan Triwulan IV Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal berada pada posisi nilai 100. Hal tersebut dapat dijabarkan pada setiap aspek sebagai berikut:

- Aspek pertama terkait kesesuaian sasaran Renstra Sekretariat Jenderal dengan RPJMN mendapatkan nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Adapun kriteria yang diamati dalam penilaian tersebut antara lain:

Kesesuaian Sasaran	:	100%
Kesesuaian Program	:	100%
Kesesuaian IKP	:	100%
Kesesuaian Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Sasaran Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Indikator Kinerja Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Output	:	100%
Kesesuaian Sub Output	:	100%
Kesesuaian Indikasi	:	100%

- Aspek kedua kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN mencapai nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk



koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan.

- Aspek ketiga tentang kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP dan KP dalam RKP mencapai nilai sebesar 30 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait Renja K/L dan RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu.
- Aspek keempat terkait kesesuaian program Renja Sekretariat Jenderal dengan Renstra Sekretariat Jenderal mencapai nilai sebesar 30 (hasil pembobotan nilai dari 100). Penilaian tersebut didapatkan melalui perbandingan sasaran program yang diakomodir dalam Renstra dengan data pada aplikasi SAKTI sudah sesuai.

IKK 5.2 Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran

Indikator Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran merupakan indikator baru yang bertujuan untuk menunjukkan keterpaduan proses perencanaan hingga implementasi hasil akhir perencanaan. Berikut merupakan kriteria penilaian yang digunakan dalam pengukuran indikator:

- RTRW
- RENSTRA
- RPJMN/D
- *MASTERPLAN*

Saat ini dalam periode Triwulan IV telah dilakukan perhitungan dengan menggunakan perbandingan antara anggaran yang terkena blokir dengan total anggaran keseluruhan kegiatan Kementerian Perhubungan pada tahun 2024. Adapun rincian blokir sampai dengan periode Triwulan IV 2024 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Catatan Hal IVa Tahun 2024

No	Unit Kerja Eselon I	Alokasi Blokir (Hal IVa)
1	Inspektorat Jenderal	Rp17.580.762.000
2	Sekretariat Jenderal	Rp3.525.396.000
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp338.458.072.000
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp281.908.709.000
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp250.507.613.000
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp161.375.389.000
7	Badan Kebijakan Transportasi	Rp7.743.435.000
8	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Rp269.614.981.000
9	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp12.410.636.000
Total		Rp1.343.124.993.000



Berdasarkan alokasi blokir IVa tersebut dapat diketahui perhitungan tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sebesar **97,07%** (persentase yang memenuhi *readiness criteria*). Berikut merupakan rincian perhitungan yang telah dilakukan:

$$100\% - \left(\frac{1.343.124.993.000}{45.872.063.871.000} \right) = 97,07\%$$

2.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perhubungan, kemudian dijabarkan kembali dalam unit kerja Sekretariat Jenderal. Penilaian dalam lingkup Sekretariat Jenderal dituangkan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Capaian Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81	80,15	98,95
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal					98,95

IKK 6 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1-ITJEN Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 49 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan T.A 2024, dapat disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap sampel implementasi SAKIP Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal, untuk tahun ini sampel dilakukan terhadap Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum, Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan serta Mahkamah Pelayaran.

Dari hasil Evaluasi, Sekretariat Jenderal memperoleh nilai sebesar **80,15 (Predikat A)** dengan Interpretasi **"Memuaskan"** yaitu terdapat gambaran bahwa Sekretariat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian penilaian dan komponen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 13 Komponen Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,06
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,38
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,63
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,08
Nilai Hasil Evaluasi			80,15
Predikat			A

Sehubungan dengan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dalam menetapkan target IKU/IKK pada dokumen Perencanaan Kinerja, memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
2. Agar meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
3. Agar selalu melakukan evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan yang dituangkan dalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulan;
4. Agar memanfaatkan hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulan yang didalamnya terdapat evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
5. Agar melakukan upaya berkesinambungan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal sampai dengan tuntas.

2.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal

Sasaran strategis meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal diwujudkan dalam penilaian unit kerja Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan rincian dari pengukuran sasaran strategis tersebut:

Tabel 2. 14 Capaian Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6	3,835	106,53
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					106,53



IKK 7 Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024 terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		1,800
2.	Struktur dan Proses		0,712
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0,870
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,382
	-MRI	3	3,034
	-IEPK	2	2,000

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan;
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional;
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.



Meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

2.1.8 Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan juga fasilitas pendukung agar dapat memadai kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan perkantoran dapat diketahui melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, dan dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Capaian Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95	93,25	98,16
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					98.16%

IKK 8 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Menentukan nilai dari indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran perlu dipenuhi beberapa data indikator sebagai berikut:

1. Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan yang meliputi RKA Biro Perencanaan yang tepat waktu, LKIP Biro Perencanaan yang tepat waktu, kinerja anggaran Biro Perencanaan, persentase pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan, persentase pencapaian indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan dengan bobot total 20%;
2. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN dengan bobot 5%;
3. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dengan bobot 5%;
4. Tingkat kehandalan sarana perkantoran dengan bobot 10%;
5. Tingkat Layanan Biro Perencanaan berupa Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Jangka Panjang dan Pentarifan (hasil dari kuesioner indeks pelayanan Biro Perencanaan) dengan bobot 60%.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
1	Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan	80,6744	20%	16,13488
	RKA Biro Perencanaan Tepat Waktu	100	20%	20
	LKIP Biro Perencanaan Tepat Waktu	100	20%	20



No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
	Kinerja Anggaran Biro Perencanaan	99,99	20%	19,998
	% Pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan	100	20%	20
	% Pencapaian Indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan	3,382	20%	0,6764
2	Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN	100	5%	5
3	Tingkat pemenuhan sarana perkantoran	81,75	5%	4,0875
4	Tingkat kehandalan sarana perkantoran	81,25	10%	8,025
5	Tingkat Layanan Biro Perencanaan	100	60%	60
Total Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran		93,25		

Berdasarkan hasil penilaian periode Triwulan IV untuk Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran mendapatkan nilai sebesar **93,25**. Penjabaran nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan

Penilaian terkait kriteria tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan mendapatkan nilai sebesar 80,6744. Penilaian tersebut diperoleh dari penjabaran 5 perhitungan pada aspek berikut ini:

- Pertama aspek Realisasi Kinerja Anggaran (RKA) Biro Perencanaan tepat waktu yang dapat diketahui dalam pelaporan pagu indikatif setiap periode;
- Kedua aspek LKIP Biro Perencanaan tepat waktu yang diketahui dari pembuatan LKIP tahunan yang dibagi ke dalam laporan monitoring setiap Triwulan yang mana nantinya terbagi dalam 4 laporan monitoring dan untuk target setiap Triwulan sama dengan nilai 25 dan kondisi saat ini sudah dikerjakan dalam tenggat waktu yang sesuai. Sehingga pada Triwulan IV saat ini mendapatkan nilai 100;
- Ketiga aspek Kinerja Anggaran Biro Perencanaan yang dapat menunjukkan daya serap anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 25.694.566.001,-** dari total pagu setelah dilakukan revisi pagu yaitu sebesar **Rp. 25.697.839.000,-** atau bisa diketahui persentase daya serap anggaran sebesar **99,99%**;
- Keempat aspek persentase pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan yang diketahui telah terpenuhi dan digunakan selama periode 2020-2024. Sehingga dapat diketahui persentase pemenuhan dokumen Renstra sebesar 100%;
- Kelima aspek persentase pencapaian Indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan saat ini hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **"terdefinisi"** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"3,382"**.

b. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN



Laporan BMN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Biro Perencanaan selaku Unit Akuntansi Kuasa pengguna Barang (UAKPB). Laporan ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

Prosedur penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) berawal dari input yang berupa dokumen sumber, yang diperoleh melalui entry data pada aplikasi SIMAK-BMN. Dokumen sumber yang dimaksud adalah:

1. Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan dan/atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.
2. Untuk transaksi perolehan/pengembangan/penghapusan, dokumen sumber yang diperlukan meliputi Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti Kepemilikan BMN, Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN berupa Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur Pembelian/Kuitansi, Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan (untuk kapitalisasi), Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Keputusan Penghapusan, dokumen pengelolaan BMN, serta dokumen lain yang sah.

Secara ketentuan, laporan BMN terdiri atas berbagai macam laporan yang disusun berbasis akuntansi, meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada UAKPB;
14. Laporan PNBPN yang terkait Pengelolaan BMN;
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Laporan BMN ini menggunakan data pada Laporan keuangan Triwulan IV tahun 2024. Hal ini untuk melihat pencapaian yang telah terjadi pada tahun 2024 apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Adapun rincian data yang dimasukkan serta kesalahan yang terjadi dalam laporan BMN Tahun 2024 selama Triwulan IV adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 18 Tabel Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi dengan Kondisi Lapangan

Aspek	Target	Realisasi
Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN dengan Kondisi lapangan	100	100

Persentase diatas diukur dari hasil rekonsiliasi Laporan keuangan pada modul persediaan, aset, akuntansi dan pelaporan, dengan sistem SPAN. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan aset telah dilakukan pencatatan oleh operator aplikasi Sakti modul Aset.

- c. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran
- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Layanan perkantoran, sudah merupakan tugas Biro Perencanaan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pejabat dan staf Biro Perencanaan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan sarana perkantoran pada Biro Perencanaan diperlukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan maksud untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan Biro Perencanaan. Penetapan target yang dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 80%, dengan alasan untuk mendorong semangat pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dalam memberikan pelayanan prima terhadap seluruh unit kerja.

Pengukuran persentase kepuasan terhadap layanan Biro Perencanaan dilakukan untuk semua jenis layanan yang diberikan, yang mewakili 4 (empat) bagian yang ada di Biro Perencanaan, yaitu layanan pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran, dalam bentuk survei melalui kuesioner. Survei yang dilakukan dengan memberikan 13 (tiga belas) pertanyaan dalam 5 (lima) kriteria, yang mengacu pada variabel penentu kualitas layanan menurut Parasumraman, Zeithaml, dan Berry, yaitu:

- 1) *Realibility* (Keandalan)
- 2) *Responsiveness* (Daya Tanggap)
- 3) *Assurance* (Jaminan)
- 4) *Emphaty* (Empati)
- 5) *Tangible* (Bukti Nyata)

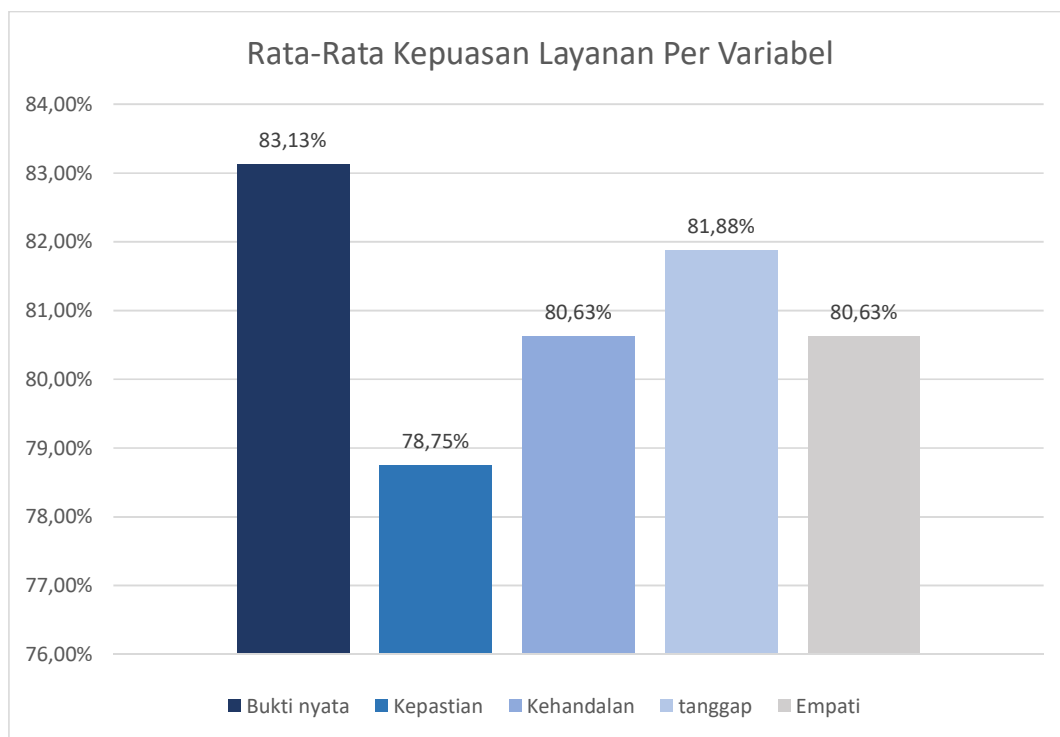
Metode pengukuran tingkat kepuasan dilakukan menggunakan skala likert dalam 5 (lima) kriteria, yaitu untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, cukup diberi nilai persepsi 3, baik diberi nilai persepsi 4 dan sangat baik diberi nilai persepsi 5. Penentuan sampel dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan setiap jenjang jabatan. Dari ketentuan tersebut, diberikan 4 (empat) kuesioner yang diharapkan untuk diisi oleh masing-masing tingkat jabatan dari Eselon III dan Staf. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa seluruh tingkat jabatan berhubungan secara langsung dengan seluruh layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan.



Dari 100 (seratus) total jumlah pegawai Biro Perencanaan, yang bersedia mengisi formulir kuesioner sejumlah 16 (enam belas) responden, yang sebenarnya belum mewakili seluruh populasi yang ada di lingkungan Biro Perencanaan. Namun demikian, karena sampai akhir periode pengukuran tidak ada penambahan, dan sampel yang kembali telah mewakili setiap jenjang jabatan, maka dianggap hasil dari responden yang masuk dapat mewakili penggambaran kinerja Biro Perencanaan. Hasil pengisian dari responden survei kepuasan layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

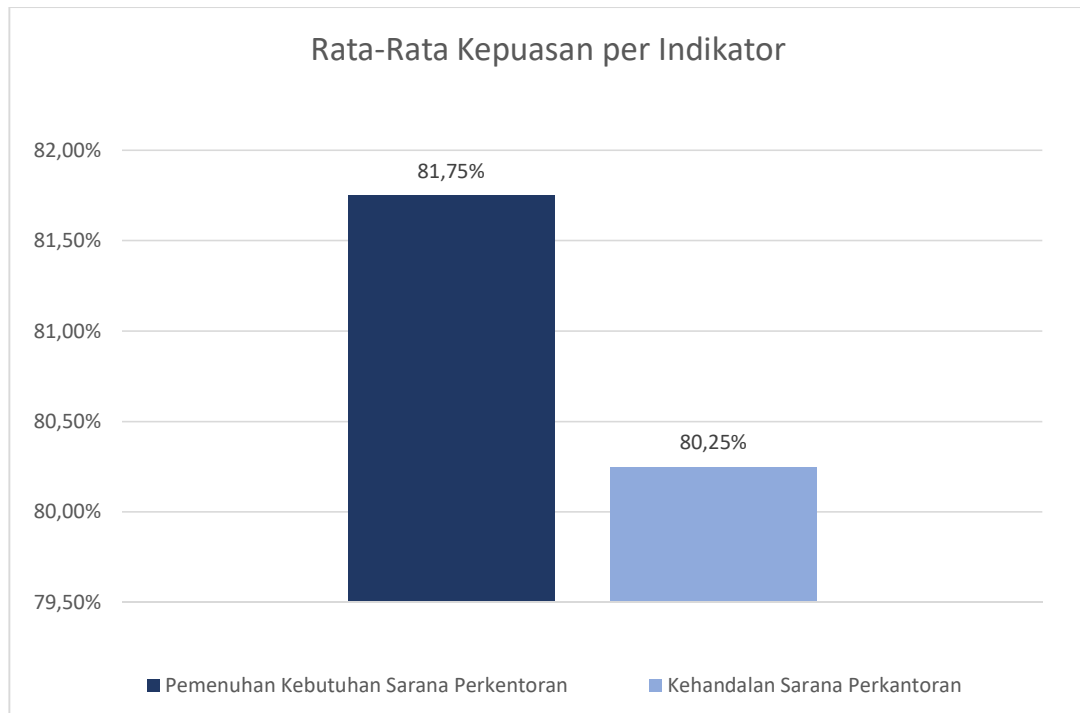
- Analisa Kepuasan Unit Kerja

Dari hasil kuesioner, rata-rata kepuasan unit kerja terhadap pelayanan pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Variabel

Dari tabel di atas, capaian rata-rata tertinggi diperoleh dari variabel **Bukti nyata (tangibles)**, yaitu sejumlah 83,13% responden menilai Baik. Variabel selanjutnya adalah Variable **daya tanggap (Responsivness)** dengan jawaban rata-rata 81.88% menilai Baik. **Kehandalan (Reability)** dan **empati (empathy)** dengan nilai 80.63% dari responden menilai Baik. **Kepastian (assurances)** dengan rata-rata jawaban 78.75%.



Gambar 2. 3 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Indikator

Dari diagram batang di atas, capaian tertinggi diperoleh dari indikator pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, yaitu sejumlah 81.75% responden menjawab puas. Sedangkan capaian terendah diperoleh dari indikator kehandalan sarana perkantoran dengan 80.25% responden menjawab puas.

Dari hasil kompilasi data di atas, dilakukan perhitungan persentase kepuasan untuk masing-masing Bagian, yang kemudian dirata-rata menjadi realisasi persentase kepuasan layanan Biro Perencanaan. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. 19 Hasil Perhitungan Kepuasan Layanan Kantor di Biro Perencanaan

Variabel	Bukti nyata	Kepastian	Kehandalan	tanggap	Empati	Rata-rata
Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkantoran	86,25%	80,00%	81,25%	82,50%	78,75%	81,75%
Kehandalan Sarana Perkantoran	80,00%	77,50%	80,00%	81,25%	82,50%	80,25%
Rata-Rata	83,13%	78,75%	80,63%	81,88%	80,63%	81,00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan beberapa analisis yang memperlihatkan secara lebih jelas rata-rata kepuasan unit Kerja dalam beberapa variabel yang diukur untuk masing-masing Bagian, yaitu:



a. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkantoran

Terkait pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, diketahui rata-rata kepuasan tertinggi terletak pada variabel daya tanggap (Responsivness) dengan rata-rata 82,50%; sedangkan indeks terendah terletak pada empati (empathy) dengan rata-rata 78,75%. Adapun rata-rata tingkat kepuasannya adalah 81,75%. Sesuai dengan hasil survei tersebut, secara umum tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran di Biro Perencanaan dapat dikategorikan tinggi karena indeks rata-rata yang diperoleh sebesar 81,75% yang telah melampaui target yaitu 80%.

Adapun aspek yang tidak mencapai target adalah aspek empati (empathy). Adapun tindaklanjut dari penurunan penilaian aspek tersebut pada periode Triwulan IV, perlunya Pengelola sarana perkantoran memperhatikan kebutuhan fasilitas yang mendukung produktivitas kerja, seperti ruang kerja yang nyaman dan perangkat teknologi yang memadai.

b. Keandalan Sarana Perkantoran

Terkait kepuasan keandalan sarana perkantoran, diketahui rata-rata kepuasan tertinggi terletak pada variabel empati (empathy) dengan rata-rata 82,50%; sedangkan rata-rata kepuasan terendah terletak pada variabel kepastian dengan rata-rata 78,75%. Adapun rata-rata tingkat kepuasannya adalah 80,25%. Sesuai dengan hasil survei tersebut, secara umum tingkat keandalan sarana perkantoran di Biro Perencanaan dapat dikategorikan baik karena telah melampaui target yaitu 80%.

Variable yang tidak mencapai target adalah variabel kepastian dengan rata-rata sebesar 78,75%. Variabel kepastian merujuk pada rasa aman dan percaya yang diberikan kepada karyawan terkait kualitas dan keandalan fasilitas yang disediakan. Adapun tindaklanjut yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan pada aspek ini, memastikan pegawai mendapatkan informasi yang jelas tentang ketersediaan, pengadaan, atau perbaikan fasilitas kantor

c. Tingkat layanan Biro Perencanaan

Penilaian terkait tingkat layanan Biro Perencanaan meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Kedua kegiatan tersebut merupakan hasil dari pengisian kuisioner oleh responden yang dilakukan dalam setiap kuartal. Hasil rincian penilaian dapat diketahui untuk IKM mendapatkan nilai 17,50 dengan capaian 100% (Sangat Baik) dan IPK mendapatkan nilai 17,50 dengan capaian 100% (Sangat Baik) pada periode bulan Desember 2024, sehingga didapatkan perhitungan rata-rata tingkat pelayanan Biro Perencanaan dengan capaian **100% (Sangat Baik)**.



2.1.9 Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan

Selain pada Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan juga dituntut untuk meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan. Tentunya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pegawai memberikan dukungan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Maka dari itu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat kapabilitas kepegawaian dan organisasi di Biro Perencanaan, adapun penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Capaian Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72	72,95	101,32
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90	100	111,11
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan					106,22%

IKK 9.1 Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan

Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2023. Adapun penyesuaian beberapa bobot dimensi yang diperhitungkan dalam Indeks Profesionalisme ASN adalah:

1. Kualifikasi pendidikan dengan bobot 25%;
2. Kompetensi dari ASN (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/Workshop), dengan bobot 40%;
3. Kinerja yang dihitung berdasarkan SKP ASN dengan bobot 30%, dan
4. Dimensi disiplin dengan bobot 5%.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria diatas Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan selama Triwulan IV tahun 2024 dengan menggunakan data terkait di *update* pada bulan Desember 2024 menunjukkan realisasi sebesar **72,95**.



IKK 9.2 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan maupun fasilitas yang didapatkan oleh para pegawai. Biro Perencanaan c.q Bagian Rencana mencoba merumuskan beberapa data indikator yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan yakni:

1. Tersusunnya Dokumen Peta Jabatan Biro Perencanaan dengan bobot 30%;
2. Persentase kesesuaian formasi ASN dengan yang ada pada Dokumen Peta Jabatan dengan bobot 25%;
3. Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat/jabatan ASN dengan bobot 15%;
4. Persentase gaji dan tunjangan tepat waktu dengan bobot 15%;
5. Persentase ketepatan waktu perolehan SK Pensiun dengan bobot 15%. (jika dalam tahun berjalan tidak terdapat ASN yang pensiun maka tetap dinilai 15).

Setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, indeks tata kelola manajemen ASN di lingkungan Biro Perencanaan pada Triwulan IV tahun 2024 didapati nilai sebesar 100. Kondisi saat ini untuk pelaksanaan dokumen Peta Jabatan pada Biro Perencanaan telah menggunakan dokumen Peta Jabatan Biro Perencanaan Tahun 2024 yang tertera dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 28 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dengan ditetapkannya Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan yang baru, maka capaian kinerja yang akan diukur pada tahun 2024 ini terdiri dari **9 (sembilan)** pengukuran indikator kinerja kegiatan dengan pengukuran capaian kinerja yang dapat disandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada waktu mendatang akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan akan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan saja, serta capaian indikator kinerja kegiatan 2024 menjadi **baseline** untuk target capaian kinerja tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode Triwulan IV tahun 2024, realisasi capaian kinerja Biro Perencanaan pada Triwulan IV tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Capaian Triwulan IV Tahun 2024 Biro Perencanaan

Kode IK	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97,76	128,63%
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78,85	98,56%



Kode IK	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6	3,382	93,94%
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96,2	113,18%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan					
IKK 3	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75	0,74	98,67%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					
IKK 4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73	48,07	65,85%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran					
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85	100	117,65%
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80	97,07	121,34%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal					
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81	80,15	98,95%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					
IKK 7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6	3,382	93,94%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					
IKK 8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95	93,25	98,16%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan					
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72	72,95	101,32%
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90	100	111,11%
Capaian Kinerja Biro Perencanaan TW IV					106,60%

2.2 Realisasi Anggaran

Evaluasi Kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian Perhubungan. Sedangkan peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-022.01.1.466301/ 2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp. 27.383.678.000,-** namun terdapat **blokir anggaran** atau dana yang tidak dapat dicairkan yaitu sebesar **Rp. 1.685.839.000,-** sehingga total anggaran Biro Perencanaan tahun 2024



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV - Biro Perencanaan Tahun 2024

menjadi **Rp. 25.697.839.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 25.694.566.001,-**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Biro Perencanaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **99,99%**. Adapun rincian anggaran yang telah terserap adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Triwulan IV		
		Anggaran	Realisasi	%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan				
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan			
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel				
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan			
	Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	Rp2.151.008.000	Rp2.151.007.950	100,00%
	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Kementerian Perhubungan	Rp329.868.000	Rp329.868.000	100,00%
	Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Melalui Aplikasi e-Performance Kementerian Perhubungan Tahun 2023	Rp205.620.000	Rp205.620.000	100,00%
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024	Rp12.926.000	Rp12.925.400	100,00%
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan			
	Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	Rp370.483.000	Rp370.483.000	100,00%
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan			
	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Kemenhub Dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot/Antar Kementerian/Lembaga dan Luar Negeri	Rp2.404.998.000	Rp2.404.996.409	100,00%
	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan Tahun 2005-2025	Rp741.036.000	Rp741.036.000	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan				
IKK 3	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan				
IKK 4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan			
	Pendampingan Penyusunan Background Study RPJP Sektor Perhubungan 2025-2045 : Peran Keselamatan, Keamanan, Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Global tahun 2045	Rp341.872.000	Rp341.868.000	100,00%



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV - Biro Perencanaan Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Triwulan IV		
		Anggaran	Realisasi	%
	Pendampingan Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	Rp756.170.000	Rp756.066.000	99,99%
	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelayanan Jasa Kapal Dan Barang Di Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial	Rp278.623.000	Rp278.376.300	99,91%
	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Tarif Penumpang dan Barang Pada Pengoperasian Angkutan Perairan Transportasi Laut	Rp122.240.000	Rp122.228.400	99,99%
	Monitoring dan Evaluasi Biaya Pokok dan Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, PJP4U, Check-In Counter dan Garbarata Di Bandar Udara Yang Melayani Penerbangan Niaga Berjadwal	Rp233.133.000	Rp233.130.800	100,00%
	Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Tarif Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan BLU Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Rp306.314.000	Rp306.312.084	100,00%
	Monitoring Dan Evaluasi Tarif Angkutan Darat Yang Melayani di Wilayah Perbatasan dan 3T	Rp126.463.000	Rp126.411.400	99,96%
	Monitoring Dan Evaluasi Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Rp222.363.000	Rp222.339.900	99,99%
	Kajian Pendahuluan (Background Study) RPJP Sektor Perhubungan 2025-2045 : Peran Keselamatan, Keamanan, Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Global tahun 2045	Rp1.830.090.000	Rp1.830.089.190	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran				
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal			
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal TA. 2025	Rp171.430.000	Rp171.430.000	100,00%
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran			
	Identifikasi Dukungan Kemenhub Terhadap Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi Tahun 2024	Rp340.021.000	Rp340.020.900	100,00%
	Pembukaan dan Pembahasan Terpadu dalam Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Kegiatan Kementerian Perhubungan TA. 2025	Rp2.156.562.000	Rp2.156.561.280	100,00%
	Rapat Penyusunan RKA K/L TA. 2025 Dalam Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan	Rp432.080.000	Rp432.080.000	100,00%
	Penyusunan dan Pendampingan Pengisian Aplikasi KRISNA dalam Rangka Penyusunan RKA-KL TA. 2025	Rp185.242.000	Rp185.190.800	99,97%
	Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kementerian Perhubungan Tahun 2025	Rp449.792.000	Rp449.791.100	100,00%
	Penyusunan Buku Investasi Alokasi Anggaran Tahun 2025 dan Pengkinian Data Tahun 2024 Kementerian Perhubungan	Rp175.502.000	Rp175.336.000	99,91%
	Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	Rp195.298.000	Rp195.298.000	100,00%



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV - Biro Perencanaan Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Triwulan IV		
		Anggaran	Realisasi	%
	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Kegiatan Yang Didanai Dari SBSN dan DAK Tahun 2024	Rp259.943.000	Rp259.942.000	100,00%
	Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Rp179.372.000	Rp179.359.900	99,99%
	Kajian Kebutuhan Layanan Angkutan Pariwisata Dari Perspektif Pengguna	Rp97.125.000	Rp97.125.000	100,00%
	Evaluasi Manfaat Pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Di Lingkungan Perkeretaapian	Rp97.236.000	Rp97.236.000	100,00%
	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengisian Data Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39 Tahun 2006) dan Aplikasi SMART	Rp143.496.000	Rp143.495.500	100,00%
	Ex-Post Impact Assessment Kinerja Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat dan Perkeretaapian Tahun 2020-2024	Rp30.517.000	Rp30.515.300	99,99%
	Pemantauan Kegiatan Kementerian Perhubungan Dalam Janji Presiden Yang Dipantau Oleh Kantor Staf Presiden (KSP)	Rp219.079.000	Rp219.048.000	99,99%
	Pemantauan Pembangunan Infrastruktur yang Bersumber dari NonAPBN Tahun 2024 dan Evaluasi Tahun 2023	Rp11.358.000	Rp11.357.800	100,00%
	Eksplorasi Peran Kualitas Pelayanan Angkutan Umum dalam Meningkatkan Loyalitas Penumpang Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	Rp96.437.000	Rp96.436.800	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal				
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal			
	Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan Tahun 2025-2029	Rp410.000.000	Rp409.952.700	99,99%
	Pemantauan Kegiatan SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024	Rp312.580.000	Rp312.545.000	99,99%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal				
IKK 7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran				
IKK 8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			
	Penyelenggaraan Bidang Ketatausahaan Biro Perencanaan	Rp197.594.000	Rp197.586.500	100,00%
	Kebutuhan Sehari-hari perkantoran	Rp3.264.781.000	Rp3.262.635.265	99,93%
	Langganan Daya dan Jasa	Rp106.681.000	Rp106.499.655	99,83%
	Pemeliharaan Kantor	Rp988.455.000	Rp988.421.800	100,00%
	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp104.754.000	Rp104.754.000	100,00%
	Sewa Kendaraan Bermotor R-4	Rp1.035.840.000	Rp1.035.840.000	100,00%
	Sewa Alat Pengolah Data	Rp199.450.000	Rp199.450.000	100,00%



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV - Biro Perencanaan Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Triwulan IV		
		Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Rp316.881.000	Rp316.793.500	99,97%
	Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan	Rp441.821.000	Rp441.820.449	100,00%
	Konsultan Perancangan Untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan	Rp52.448.000	Rp52.447.500	100,00%
	Konsultan Pengawas Untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan	Rp38.850.000	Rp38.850.000	100,00%
	Bantuan Teknis Tenaga Ahli dan Supporting	Rp584.909.000	Rp584.908.250	100,00%
	Knowledge Management Penyiapan Materi Paparan Pimpinan	Rp551.579.000	Rp551.577.750	100,00%
	Peningkatan Jiwa Korsa dan Kesemampuan Pegawai	Rp402.592.000	Rp402.591.700	100,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Tahun 2024	Rp242.840.000	Rp242.838.300	100,00%
	Penyusunan Laporan Keuangan (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN)	Rp134.980.000	Rp134.965.200	99,99%
	Pengelolaan Arsip dan Barang Milik Negara (BMN) Biro Perencanaan	Rp151.095.000	Rp151.094.919	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan				
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan			
	Capacity Building Jabatan Fungsional Tertentu	Rp240.000.000	Rp239.999.600	100,00%
	Training Tarif Transportasi	Rp87.807.000	Rp87.807.000	100,00%
	Peningkatan Kompetensi SDM Biro Perencanaan	Rp158.205.000	Rp158.203.700	100,00%
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan			
Total Anggaran		Rp25.697.839.000	Rp25.694.566.001	99,99%



3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Capaian Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Biro Perencanaan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Laporan Monitoring Triwulan IV ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan bagi Unit Kerja Biro Perencanaan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang. Adapun Capaian Kinerja Triwulan IV Biro Perencanaan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil yang diperoleh dari proses perbandingan ini adalah dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah berbasis *outcome*, dapat dinyatakan tercapai sebesar **106,60%**;
2. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-022.01.1.466301/ 2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp. 27.383.678.000,-** namun terdapat **blokir anggaran** sebesar **Rp. 1.685.839.000,-** sehingga total anggaran Biro Perencanaan tahun 2024 menjadi **Rp. 25.697.839.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 25.694.566.001,-**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Biro Perencanaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **99,99%**.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV Biro Perencanaan Tahun 2024 yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran/rekomendasi yang dapat dilakukan pada periode pengukuran selanjutnya. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dokumen Perencanaan, renaksi atas perjanjian kinerja, monitoring rencana aksi sampai dengan laporan monitoring capaian kinerja selama 5 tahun terakhir agar didokumentasikan dengan baik untuk evaluasi atas implementasi SAKIP pada tahun-tahun berikutnya;
2. Pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, penyesuaian Perencanaan kinerja yang akan datang dan perubahan budaya kinerja organisasi;
3. Mengikutsertakan Tim Penyusun dan Tim Evaluator Internal SAKIP Biro Perencanaan dalam kegiatan sosialisasi, seminar ataupun bimbingan teknis terkait penyusunan dan evaluasi atas implementasi SAKIP;
4. Terdapat Indikator Kinerja yang bukan merupakan tugas Biro Perencanaan yaitu pada IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan (Biro Hukum), IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan (Biro Hukum), dan IKK 3 Indeks *Merit System* Kementerian Perhubungan (Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi);
5. Terbatasnya kuantitas formasi jabatan fungsional Perencana Madya dan Utama sehingga menghambat pengembangan kompetensi SDM Perencanaan.



LAMPIRAN

Lampiran I : Capaian TW IV Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97,76	128,63%
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78,85	98,56%
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6	3,382	93,94%
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96,2	113,18%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan					
IKK 3	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75	0,74	98,67%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					
IKK 4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73	48,07	65,85%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran					
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85	100	117,65%
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80	97,07	121,34%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal					
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81	80,15	98,95%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					
IKK 7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6	3,382	93,94%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					
IKK 8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95	93,25	98,16%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan					
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72	72,95	101,32%
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90	100	111,11%
Capaian Kinerja Biro Perencanaan TW IV					106,60%



Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Widodo

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Novie Riyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maratua, 6 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan

NOVIE RIYANTO

SIGIT WIDODO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PERENCANAAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK3.1	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
SK 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	IKK4	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Nilai	73
SK 5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	IKK5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		IKK5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80
SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	IKK6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	IKK7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95
SK 9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	IKK9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72
		IKK9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum

Anggaran

Rp. 819.631.000,-
Rp. 26.441.547.000,-

Disetujui,
Sekretaris Jenderal


NOVIE RIYANTO

Maratua, 6 Januari 2024
Kepala Biro Perencanaan


SIGIT WIDODO



Lampiran III : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sigit Widodo

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Novie Riyanto R

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Desember 2024

Pihak Kedua

NOVIE RIYANTO R

Pihak Pertama

SIGIT WIDODO



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Nilai	73
5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	70
		Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95
9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90

Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

Anggaran

Rp. 27.383.678.000,-

Jakarta, 03 Desember 2024

Sekretaris Jenderal

NOVIE RIYANTO R

Kepala Biro Perencanaan

SIGIT WIDODO



Lampiran IV : Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-23679/SES/PP.01/11/2024 Jakarta, 26 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Informasi Hasil Penilaian Indeks
Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
Tahun 2024

Yth.,
Mohon lihat daftar terlampir,
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berdasarkan dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatannya terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama Surat ini kami lampirkan (1) Hasil penilaian IPPN K/L dan Pemerintah Provinsi; dan (2) Rekomendasi untuk peningkatan nilai IPPN kedepannya.

Untuk konfirmasi informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi staf kami (Sdra. Moh. Ikhlashul Amal/ +62 812-8186-2686).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.





**DOKUMEN HASIL PENILAIAN
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Total Nilai : 96,20
Predikat : Sangat Baik



Lampiran V : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG, DAN PERHUBUNGAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TAHUN 2023/2024 YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS OLEH APIP
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PE.09.03/LHP- 194/D103/2/2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024**



-2-

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan.
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

B. Rekomendasi

Meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian



-3-

tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

Terkait proses Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kepala Biro Perencanaan dalam menyusun laporan penilaian mandiri SPIP tingkat kementerian agar diungkapkan potret pengendalian yang telah dilakukan secara umum dan kelemahan-kelemahan pengendalian yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta hasil pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.
2. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.

Terkait substansi hasil Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan satker-satker untuk menyusun profil risiko berbasis proses bisnis sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan penetapan konteks dan identifikasi risiko secara lebih komprehensif, terutama terkait risiko *fraud*/kecurangan dan risiko kemitraan.
3. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian atas kinerja satker sehingga temuan BPK atas ketidakpatuhan dapat diminimalisir.
4. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Uraian secara rinci disajikan pada Bab II.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Kementerian Perhubungan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Direktur,

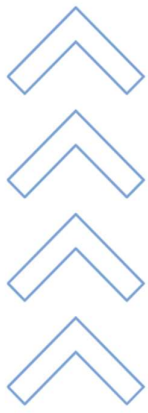
Ditandatangani secara elektronik oleh

Kisyadi



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E





@Kemenhub151

